



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN DARU SUKMANA
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 282728

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.165.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/122 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 815.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/159 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 436.455.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 35.455.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 924.800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 982.600.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.508.855.000

III. HUTANG

Rp. 938.021.040

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.570.833.960

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.